Kementerian PPN/ Bappenas

Australian Government

SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PEMBELAJARAN DARI PROGRAM LANDASAN

BaKTI

KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PEMBELAJARAN DARI PROGRAM LANDASAN

KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN:
PEMBELAJARAN DARI PROGRAM LANDASAN

ISBN: 978-623-95507-0-7
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
© (tahun terbit) Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Penyusun:
Afrizal Abdul Rasyid
Desiderius Bir
Erickson Sijdabat
Irene Anastasia
Ottow Sineri
Ricky Djodjobo
Septer Manufandu

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini. Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini dapat disalin dan disebarkan untuk tujuan non-komersial.
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi communication@kompak.or.id
Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)
Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia
Jalan Diponegoro No. 72
Jakarta Pusat, 10320
Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

Daftar Isi

Pengantar 4

1. Sinergi Perencanaan dalam Konteks Pembangunan Papua dan Papua Barat 6

2. Menyamakan Visi Internal tentang Sinergi Perencanaan Pembangunan 11

3. Memperkenalkan dan Mengonsultasikan Model Sinergi Perencanaan di Kabupaten Sekaligus Membangun Komitmen Pemerintah Daerah 16

4. Mempersiapkan *Trainer*/Fasilitator Kabupaten 21

5. Mempraktikkan Konsep Sinergi Perencanaan 27

Pengantar

Program KOMPAK-LANDASAN Fase II adalah program yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat di tanah Papua terhadap layanan dasar yang berkualitas. Dalam periode implementasi program tahun 2017-2018, upaya telah difokuskan untuk peningkatan kapasitas di masing-masing unit layanan dan kampung. Namun, tantangan permasalahan layanan dasar di tanah Papua dirasa belumlah cukup tertangani hanya dari peningkatan kapasitas di masing-masing unit layanan dan kampung. Membangun sinergi bersama dengan pihak-pihak yang telah memperoleh peningkatan kapasitas sebelumnya, diyakini dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam menghadapi permasalahan layanan dasar.

Bersinergi adalah bekerja bersama-sama untuk satu tujuan. Seperti itulah kampung dan unit layanan dasar berkolaborasi untuk kemajuan bersama. Untuk itu maka periode 2019-2021, Program KOMPAK-LANDASAN Fase II diarahkan untuk berfokus pada upaya membangun mekanisme yang bersinergi antara unit layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan (Puskesmas dan sekolah dasar) dengan kampung. Mekanisme tersebut tertuang dalam sebuah model sinergi perencanaan yang proses perjalanannya diceritakan dalam buku ini.

Buku "Sinergi Perencanaan Pembangunan: Pembelajaran dari Program LANDASAN" ini sendiri merupakan sekumpulan cerita tentang proses membangun sinergi perencanaan. Mulai dari penyusunan konsep hingga implementasi di tingkat kampung, Puskesmas dan sekolah yang dilakukan oleh tim KOMPAK-LANDASAN. Diharapkan rangkaian buku ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang proses membangun sinergi perencanaan yang dijalankan oleh Program KOMPAK-LANDASAN. Cerita-cerita yang termuat dalam buku ini sekiranya juga dapat menjadi inspirasi bagi mereka yang hendak membangun model sinergi perencanaan di tingkat kampung, Puskesmas dan sekolah.

Buku ini adalah rangkaian dari seri produk pengetahuan program sinergi perencanaan yang berisi ringkasan esensi konsep dan mekanisme untuk mengimplementasikan model sinergi perencanaan yang digagas dan dikembangkan oleh Tim KOMPAK-LANDASAN. Rangkaian buku ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara cepat dan sederhana kepada pengguna tentang apa dan bagaimana mekanisme bersinergi antara kampung dengan unit layanan (Puskesmas atau sekolah) dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sudah ada dan dikenal selama ini. Informasi yang lebih komprehensif mengenai latar belakang, dasar-dasar hukum, definisi, serta detil dari mekanisme perencanaan yang bersinergi antara kampung, Puskesmas dan sekolah dapat dibaca pada rangkaian lainnya dari buku ini.

Semoga bermanfaat

Tim Penulis

1 Apa Yang Dimaksud Dengan Sinergi Perencanaan

1.1 Pentingnya Sinergi Dalam Perencanaan

Program KOMPAK – LANDASAN Fase II bertujuan meningkatkan akses masyarakat di Papua dan Papua Barat terhadap layanan dasar yang berkualitas. Sejak 2017 berbagai kegiatan peningkatan kapasitas terhadap unit-unit layanan dasar kesehatan dan pendidikan telah diimplementasikan dalam Program KOMPAK-LANDASAN Fase II. Selain itu, program ini juga mengupayakan peningkatan kapasitas pemerintah kampung, melalui upaya perbaikan tata kelola pemerintahan kampung, dengan harapan dapat memperluas peluang pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai pelayanan dasar. Hingga tahun 2018, berbagai capaian membanggakan dari Program KOMPAK-LANDASAN Fase II antara lain keberadaan dan peran kader sebagai agen perubahan di kampung, tersedianya data dan sistem pendataan di kampung, kesadaran pemerintah kampung tentang proses perencanaan kampung yang benar, pengetahuan Puskesmas tentang metode perencanaan yang berbasis kebutuhan dan permasalahan lokal, pengetahuan sekolah tentang perencanaan sekolah yang efektif, keberadaan komite sekolah serta munculnya kesadaran akan fungsi mereka.

Capaian-capaian dalam periode implementasi program pada 2017-2018 di atas memang berasal dari upaya yang telah difokuskan untuk peningkatan kapasitas masing-masing unit layanan dan kampung. Namun, tantangan permasalahan layanan dasar di Papua dan Papua Barat dirasa belumlah cukup tertangani hanya dengan upaya peningkatan kapasitas di masing-masing unit layanan dan kampung tersebut.

Tampak bahwa persoalan kesehatan dan pendidikan yang terjadi sebagian besar adalah persoalan yang berulang dari tahun-tahun sebelumnya. Namun metode penanganan yang dilakukan pun masih sama di setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu ada perubahan pada pola kerja dan perencanaan. Misalnya ketika kampung hendak membuat perencanaan berkaitan dengan kesehatan masyarakat, sebelum itu idealnya kampung harus memiliki informasi yang cukup dan akurat mengenai kondisi kesehatan masyarakat dan metode penyelesaian masalah yang efektif untuk dilakukan.

Gambar 1.
Komponen dan Unit Layanan yang Perlu Bekerja sama

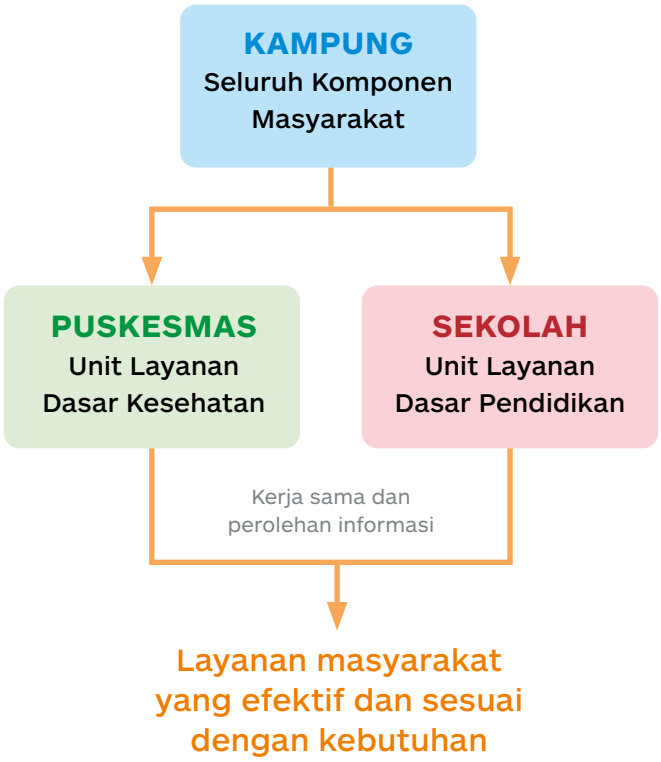

Hal ini tentu membutuhkan keterlibatan Puskesmas sebagai pihak yang memiliki kompetensi dalam mengelola upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat. Hal yang sama juga terjadi dalam bidang pendidikan yang memerlukan keterlibatan sekolah di dalamnya.

Sayangnya, seringkali kampung membuat keputusan tanpa melibatkan unit layanan dalam proses perencanaan kampung yang berkaitan dengan lingkup kompetensi dan fungsi dari unit layanan terkait. Akibatnya beberapa penyelesaian masalah kampung berjalan tidak efektif karena data yang tidak akurat, ataupun kurangnya pengetahuan kampung tentang cara mengatasi persoalan kesehatan dan pendidikan secara efektif. Hal yang sama juga dialami unit layanan kesehatan dan pendidikan yang membutuhkan masukan dari masyarakat kampung untuk mengetahui dan mengkonfirmasi kebutuhan aktual mereka, serta bekerja sama dalam mengidentifikasi solusi yang tepat dan menghadapi masalah kesehatan dan pendidikan di kampung.

Belajar dari kondisi yang terjadi ini, ide untuk membangun sinergi antara kampung dan unit layanan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk menghadapi masalah-masalah kesehatan maupun pendidikan di masyarakat muncul dan mulai dikembangkan. Bersinergi dalam hal ini adalah memadukan upaya dan sumber daya yang dimiliki antara kampung dan unit layanan dasar kesehatan dan pendidikan untuk menjawab permasalahan yang

dialami bersama-sama. Membangun sinergi bersama dengan pihak-pihak yang telah memperoleh peningkatan kapasitas sebelumnya, diyakini dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam menghadapi permasalahan layanan dasar.

Jika selama ini kampung dan unit layanan membuat perencanaan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri-sendiri, maka dalam sinergi perencanaan ini, kampung dan unit layanan bekerja sama mulai dari tahap perencanaan. Kehadiran unit layanan ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah kerja unit layanan tersebut berada. Upaya dari unit layanan akan memberikan hasil yang lebih efektif bagi masyarakat manakala masyarakat juga turut melakukan peran mereka untuk mendukung tercapainya hasil yang diharapkan.

Dalam konsep bersinergi, Puskesmas sebagai unit layanan dasar kesehatan dan sekolah sebagai unit layanan dasar pendidikan turut berperan membantu menyelesaikan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh kampung. Sebaliknya, kampung mengambil peran membantu upaya Puskesmas dalam mengatasi persoalan kesehatan yang dialami masyarakat. Kampung dan masyarakat juga turut berperan membantu upaya sekolah mengatasi persoalan pendidikan yang dihadapi oleh sekolah dalam upaya mencerdaskan anak-anak di kampung tersebut. Masing-masing sektor melakukan peran mereka yang tidak dapat dilakukan sektor lainnya untuk mencapai hasil yang diharapkan bersama. Demikianlah sinergi perencanaan ini akan bekerja. Program KOMPAK-LANDASAN percaya bahwa kerja sama antara unsur atau lembaga yang berbeda yang sengaja diarahkan untuk saling mengisi dan melengkapi akan berguna untuk mencapai hasil yang lebih baik dibanding dikerjakan sendiri-sendiri.

Membangun sinergi bersama dengan pihak-pihak yang telah memperoleh peningkatan kapasitas sebelumnya, diyakini dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam menghadapi permasalahan layanan dasar.

Gambar 2. Kelompok/Lembaga yang Bersinergi dalam Program LANDASAN

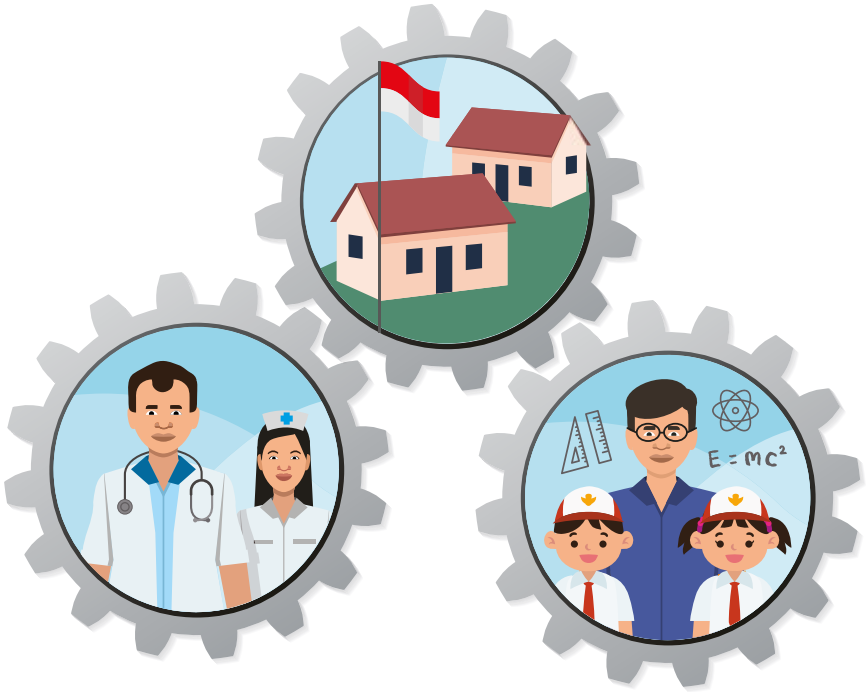

1.2 Sinergi Perencanaan dalam Konteks Pembangunan Papua dan Papua Barat

Upaya penyediaan layanan dasar yang berkualitas menjadi target pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang memiliki tantangan khusus diantaranya sebaran penduduk yang tinggal di daerah yang sulit secara geografis serta keterbatasan kapasitas unit layanan untuk memberikan pelayanan berkualitas. Hingga saat ini indikator pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan di kedua provinsi ini masih jauh tertinggal dibandingkan indikator nasional.

Di era otonomi daerah, pemerintah kampung juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan sendiri pemerintahannya. Kampung memiliki peluang untuk membuat perencanaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun sebelum itu, perlu untuk memastikan kapasitas kampung dalam menyusun perencanaan. Hal yang sama juga terjadi dalam layanan dasar kesehatan dan pendidikan.

Tidak berhenti sampai peningkatan kapasitas, sinergi perencanaan pun dikembangkan untuk mencapai tujuan utama program yaitu meningkatkan akses masyarakat Papua dan Papua Barat terhadap layanan dasar yang berkualitas. Telah banyak program pembangunan yang menyasar Papua dan Papua Barat. Namun sinergi perencanaan melalui mekanisme yang jelas merupakan hal yang baru bagi kampung. Dalam konteks pembangunan di Papua dan Papua Barat, sangat sulit menemukan kampung yang membuat perencanaannya secara mandiri terlebih melakukan perencanaan secara bersinergi. Sambutan baik diperoleh di berbagai kabupaten dampingan Program KOMPAK-LANDASAN Fase II di antaranya Manokwari Selatan, Fakfak, Sorong, Kaimana, Jayapura, Nabire, Asmat dan Boven Digoel. Ungkapan apresiasi bahwa ini adalah pertama kalinya Puskesmas dan sekolah dilibatkan dalam perencanaan ditemui di seluruh wilayah program.

Melalui sinergi perencanaan dapat menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat. Adanya pertemuan antara kampung dan unit layanan ini menjadi kesempatan untuk memaparkan data, menganalisa dan membahas solusinya bersama-sama sehingga program yang direncanakan pun berdasarkan dengan permasalahan dan kebutuhan di masing-masing unit layanan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Program ini bekerja untuk membangun dan mendorong institusionalisasi mekanisme untuk mensinergikan upaya-upaya unit layanan, kampung dan dukungan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan aktual bidang kesehatan dan pendidikan dasar di masyarakat. Karena itu, poin penting untuk berjalannya konsep ini sendiri adalah komitmen dari pemerintah daerah.

Sinergi perencanaan dapat menghasilkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat.

2 Menyamakan Visi Internal Tentang Sinergi Perencanaan Pembangunan

2.1 Menyusun Konsep Sinergi Perencanaan

Konsep sinergi perencanaan ini bukanlah konsep yang muncul begitu saja. Konsep ini hadir melalui analisis yang mendalam terhadap proses perencanaan yang selama ini berjalan di tingkat kampung, Puskesmas dan sekolah. Setelah melakukan *review* mendalam atas capaian yang diperoleh sejak tahun 2017-2018 hasilnya menunjukkan bahwa Program KOMPAK-LANDASAN Fase II masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan penyediaan layanan dasar yang berkualitas dalam konteks Papua dan Papua Barat. Namun beberapa hal perlu dioptimalkan agar tercapai perubahan yang lebih efektif sebagaimana tujuan yang diharapkan yaitu meningkatan akses masyarakat Papua dan Papua Barat terhadap layanan dasar berkualitas. Untuk itu, ide membangun kolaborasi di antara kampung dan unit layanan ini pun muncul dalam bentuk sinergi perencanaan.

Secara garis besar, fokus kegiatan [atau program] pada periode 2019-2020 adalah untuk membangun dan mendorong institusionalisasi mekanisme untuk mensinergikan upaya-upaya unit layanan, kampung dan dukungan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan aktual bidang kesehatan dan pendidikan dasar di masyarakat.
Pada periode awal Januari–Mei 2019, konsep sinergi perencanaan ini pun mulai disusun.

Kolaborasi sebagai sistem yang terlembagakan untuk menghasilkan layanan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat.

Terutama mengkaji alur perencanaan kampung, Puskesmas dan sekolah yang berlaku untuk melihat relevansi penerapan konsep sinergi perencanaan yang digagas.

Selama ini kita seringkali melihat kerja sama antara kampung dengan sekolah, atau kampung dengan Puskesmas, ataupun sekolah dengan Puskesmas terjadi sebagai sebuah inisiatif pribadi dari pengurusnya atau karena kedekatan di antara salah satu pengurus. Pada program ini, diharapkan bahwa kolaborasi tersebut hadir bukan hanya sebagai sebuah inisiatif saja melainkan sebagai sistem yang terlembagakan untuk menghasilkan layanan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat.

Apa yang dilakukan oleh KOMPAK-LANDASAN bukanlah mengubah proses perencanaan yang selama ini telah berjalan, melainkan mencoba mengaitkan antara perencanaan di masing-masing unit layanan dan kampung. Pertama-tama dengan mengkaji alur perencanaan pada masing-masing unit layanan dan kampung, kemudian mencari celah di mana proses sinergi perencanaan ini dapat dimasukkan. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Puskesmas dan sekolah yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat itu dapat terhubung pada proses yang pas. Sehingga ada pelibatan masyarakat pada proses tertentu dalam perencanaan unit layanan, dan ada pelibatan unit layanan dalam proses perencanaan kampung.

Lantas di titik mana proses perencanaan tersebut dikaitkan? Di tingkat kampung, perencanaan termodifikasi pada proses pengkajian keadaan kampung, di tingkat Puskesmas pada saat melakukan analisis situasi, sementara itu di sekolah pada saat penyusunan visi dan misi. Di titik itulah tahapan perencanaan coba dimodifikasi dengan mengaitkan prosesnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema Gambar 3.

Demikianlah gambaran konsep dan alur sinergi perencanaan yang digagas dalam Program KOMPAK-LANDASAN. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai tahapan pelaksanaan sinergi perencanaan di masing-masing sektor ini dapat dilihat pada buku 1 dan 2 yang membahas lebih dalam mengenai tahapan tersebut.

Gambar 3. Proses dan Tahapan Perencanaan

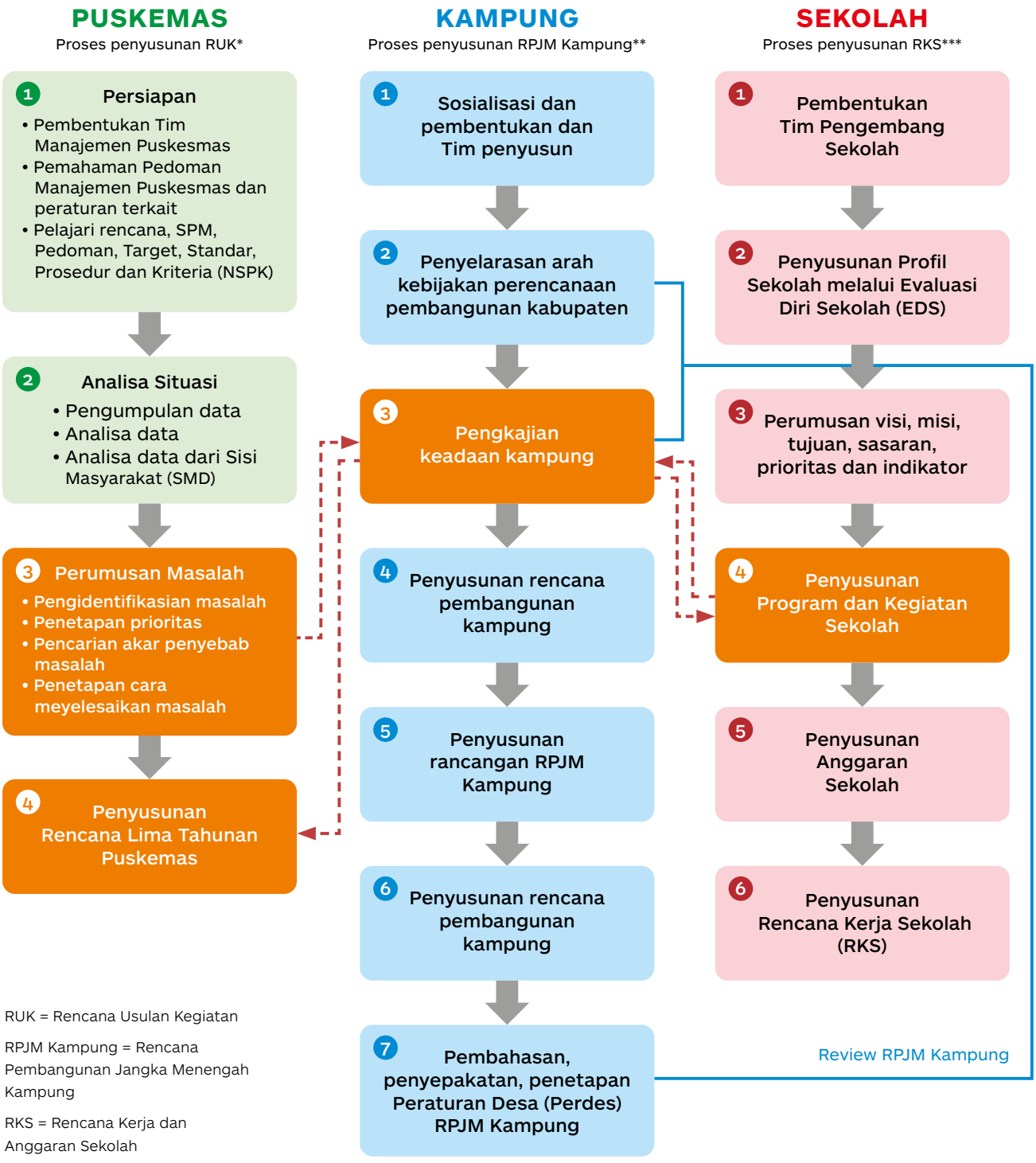

RUK = Rencana Usulan Kegiatan

RPJM Kampung = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung

RKS = Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah

Bagian proses yang "dikembangkan"/ "dimodifikasi"

Proses penginformasian analisa dan rencana unit layanan untuk mencapai harapan

Proses penyesuaian rencana di unit layanan atas kegiatan-kegiatan yang disepakati di kampung

* Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016

** Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

*** Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2007

2.2 Membangun Kesepahaman Internal tentang Sinergi Perencanaan

Sebelum mulai menjalankan sebuah model sinergi perencanaan, tentu saja dibutuhkan pemahaman yang sama terutama di internal tim KOMPAK-LANDASAN dalam melihat model tersebut. Kesamaan visi menjadi faktor penting agar proses membangun model ini bisa berjalan secara konsisten. Membangun kesepahaman mengenai model sinergi perencanaan di tingkat internal tim ini merupakan proses yang tidak kalah pentingnya. Dalam prosesnya, tesa dan antitesa terus muncul hingga akhirnya model sinergi perencanaan ini dapat dipahami bersama dan menjadi model yang siap untuk dikembangkan. Setelah melakukan *review* atas capaian pada periode 2017-2018 yang memunculkan ide untuk membangun model perencanaan yang bersinergi, optimalisasi program pun perlu dilakukan dengan mempertimbangkan strategi pendekatan yang memberi penekanan pada terwujudnya institusionalisasi dari kegiatan-kegiatan utama program serta kelayakannya untuk direplikasi. Hal ini berarti membutuhkan kejelasan prosedur atau mekanisme dari kegiatan-kegiatan dan keterkaitannya dengan output yang dihasilkan. Periode berikutnya, yaitu 2019-2021, juga difokuskan pada hal tersebut.

Pada periode awal yaitu Januari-Mei 2019, konsep sinergi perencanaan disusun. Tim KOMPAK-LANDASAN menyebut periode ini sebagai periode transisi. Pada tahap ini tim KOMPAK-LANDASAN melakukan optimalisasi desain program dan mengembangkan ide untuk membangun perencanaan yang bersinergi di tingkat kampung, Puskesmas dan sekolah. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan akses masyarakat di Papua dan Papua Barat terhadap pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan) yang berkualitas.

Meski banyak pihak di luar KOMPAK-LANDASAN yang menganggap bahwa periode awal 2019 ini adalah masa vakum program, namun sesungguhnya pada tahap inilah sebuah desain program dikembangkan. Tanpa sebuah perencanaan dan penyatuan visi yang matang, akan sulit untuk menghasilkan sebuah desain program yang berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Tidak sekadar menyepakati konsep sinergi perencanaan, periode ini memuat kesepakatan proses penyusunan tahap-tahap yang akan dilalui untuk menjalankan model sinergi perencanaan ini.

1. Tahap finalisasi dan konsultasi konsep dengan *stakeholder* utama di masing-masing kabupaten target.

2. Tahap membangun kapasitas sumber daya lokal (*training of trainer*) agar dapat menjalankan konsep program.

3. Tahap uji lapangan atas konsep, sekaligus merupakan tahap membangun kapasitas melalui proses *learning by doing*

4. Tahap evaluasi dan perbaikan atau penyempurnaan konsep

Periode transisi ini pun menghasilkan konsep sinergi perencanaan yang telah disepakati bersama dalam internal tim KOMPAK-LANDASAN. Konsep yang yang telah disepakati kemudian dituangkan dalam bentuk panduan ringkas sinergi perencanaan, berisi penjelasan tahapan-tahapan proses perencanaan yang bersinergi di tingkat kampung, Puskesmas dan sekolah untuk dikonsultasikan dengan *stakeholder* terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk mematangkan konsep yang sudah dibuat sebelum memasuki tahap berikutnya yaitu uji coba di lapangan. Kembali ditegaskan bahwa institusionalisasi dan kelayakan replikasi serta keberlanjutan program adalah poin pertimbangan penting dalam desain program ini.

Seperti apa proses persiapan hingga uji coba model sinergi perencanaan kampung dan apa saja yang dihasilkan? Bab-bab berikutnya dalam buku ini akan mengulas lebih lengkap mengenai hal tersebut.

Alur proses membangun model sinergi perencanaan Program KOMPAK-LANDASAN

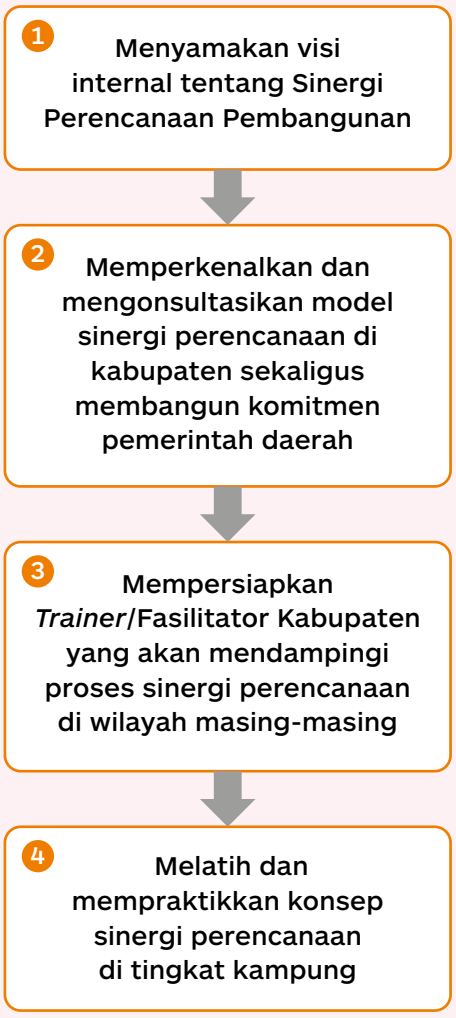

3 Memperkenalkan dan Mengonsultasikan Model Sinergi Perencanaan di Kabupaten Sekaligus Membangun Komitmen Pemerintah Daerah

3.1 *Roadshow* Sinergi Perencanaan Sekaligus Membangun Komitmen Pemerintah Daerah

Setelah proses penyusunan konsep sinergi perencanaan selesai, saatnya memperkenalkan konsep tersebut dalam bentuk *roadshow* kepada pemerintah daerah yang akan mengawal jalannya sinergi perencanaan ini. *Roadshow* ini digelar sepanjang Agustus-September 2019 di delapan kabupaten di Papua dan Papua Barat yaitu Manokwari Selatan, Fakfak, Sorong, Kaimana, Jayapura, Nabire, Asmat dan Boven Digoel. *Roadshow* ini dihadiri oleh pemerintah daerah seperti bupati dan wakil bupati, pimpinan-pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajarannya di antaranya; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selain menginformasikan rencana kerja LANDASAN untuk periode yang akan berlangsung, *roadshow* juga dilakukan untuk:

- Membangun komitmen pemerintah daerah tentang kebijakan daerah dan sistem dukungan pemerintah kabupaten terhadap implementasi program.
- Pemaparan pada peserta mengenai capaian-capaian Program KOMPAK-LANDASAN pada periode 2017-2018; konsep sinergi perencanaan yang akan dilakukan; serta model kolaborasi yang akan dijalankan bersama pada periode 2019-2021.

Sesi yang tak kalah penting dalam kegiatan *roadshow* ini adalah membangun komitmen pemerintah daerah tentang pentingnya regulasi, dukungan pembiayaan untuk operasional berkelanjutan dan pemilihan personel tim teknis yang tepat.

Tim teknis dipilih dari perwakilan masing-masing bidang yang menjadi intervensi Program KOMPAK-LANDASAN yaitu bidang kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan kampung, juga dari OPD terkait sesuai dengan peran yang dijalankan untuk mendukung program.

Tahap berikutnya adalah membahas dukungan penganggaran. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak program yang tidak berjalan efektif dan tidak berkelanjutan karena kurangnya dukungan penganggaran maupun alokasi anggaran yang tidak tepat. Di sinilah peran tim teknis diharapkan dapat melihat kembali kebutuhan dukungan bagi unit-unit layanan dasar kesehatan, pendidikan dan kampung. Selanjutnya, mengusulkan dukungan yang dibutuhkan dalam perencanaan di OPD masing-masing ataupun melalui pembiayaan khusus Tim Teknis Kabupaten bila ada, agar dapat mendorong peningkatan layanan dasar tersebut.

Apabila sinkronisasi dukungan antar OPD dalam tim teknis telah terbangun dan sumber pendanaan telah ditetapkan, selanjutnya perlu melakukan penyusunan regulasi terkait peningkatan pelayanan dasar ini. Regulasi menjadi dasar implementasi sinergi perencanaan yang berkelanjutan di daerah tersebut.

Dengan demikian, upaya memperkenalkan model sinergi perencanaan di tingkat kabupaten dan komitmen pemerintah kabupaten ini pun berjalan lancar. Bagi mereka, konsep perencanaan yang bersinergi antara kampung dan unit layanan

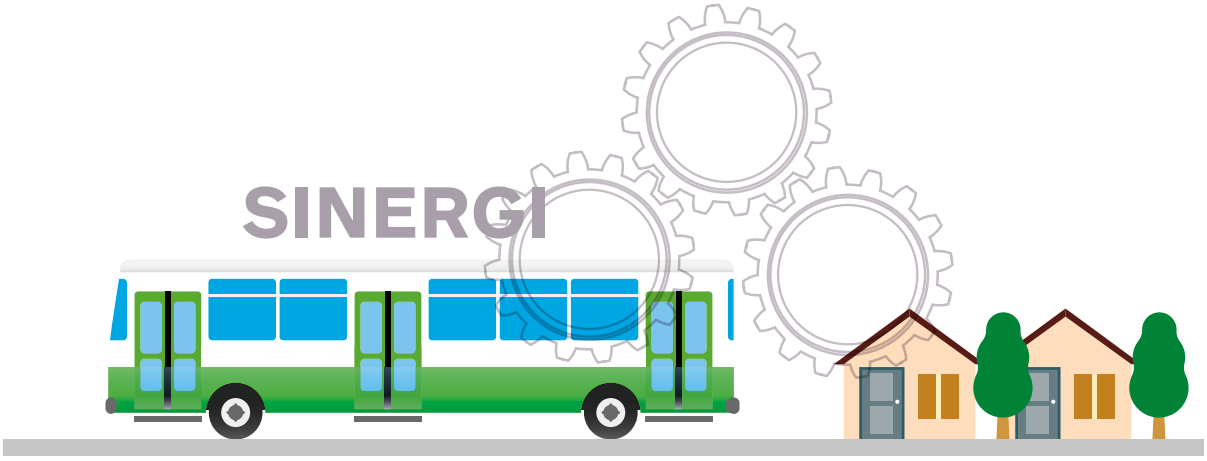

ini merupakan hal baru. Namun apresiasi dan optimisme datang dari pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari komitmen dan terbentuknya tim teknis untuk mengawal berjalannya program. Semangat perubahan ini sungguh terasa di seluruh kabupaten, menandakan bahwa model sinergi perencanaan siap untuk dikembangkan di delapan kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.

3.2 Konsultasi Panduan Model Sinergi Perencanaan dengan Instansi-Instansi Terkait

Setelah *roadshow* memperkenalkan model sinergi perencanaan selesai, tahap selanjutnya adalah proses diskusi dengan OPD terkait. Untuk mengetahui apakah sebuah model layak untuk dikembangkan, maka diperlukan diskusi dengan pihak-pihak yang selama ini terlibat mengawal proses tersebut. Dalam hal ini, pihak tersebut adalah perwakilan dari OPD yang memiliki tugas dan fungsi mengawal secara langsung bahkan terlibat dalam proses perencanaan di tingkat kampung, Puskesmas maupun sekolah. Pendapat dan saran dari mereka tentu sangat diperlukan untuk penyempurnaan model ini. Terlebih pula setiap wilayah memiliki ciri khas dan tantangannya masing-masing.

Untuk memudahkan pemahaman tentang model sinergi perencanaan secara teknis, diperlukan panduan ringkas yang berisi teknis pelaksanaan sinergi perencanaan di tingkat kampung, Puskesmas, dan sekolah. Panduan ringkas ini kemudian dikonsultasikan dengan OPD terkait yang membidangi tiga sektor tersebut.

Konsultasi ini dilakukan untuk memperoleh masukan atau pun koreksi terhadap alur sinergi perencanaan yang dibuat oleh tim KOMPAK-LANDASAN. Mengingat alur model sinergi perencanaan ini akan menyesuaikan dengan alur perencanaan masing-masing sektor yang selama ini berjalan, serta mengidentifikasi satu proses yang menjadi titik temu seluruh sektor. Meski model sinergi perencanaan ini adalah hal baru bagi pemerintah daerah, namun karena model sinergi perencanaan ini bukanlah mengubah alur perencanaan yang sudah ada, sehingga tidak sulit bagi mereka untuk memahami konsep ini.

Proses konsultasi ini menghasilkan kritik dan saran dari peserta dan menjadi bahan masukan dalam perbaikan atas draf panduan, yang digunakan untuk menyempurnakan model sinergi perencanaan yang akan dijalankan. Sekaligus tim KOMPAK-LANDASAN pun memperoleh bekal dan arahan untuk pelaksanaan model ini di delapan kabupaten nantinya.

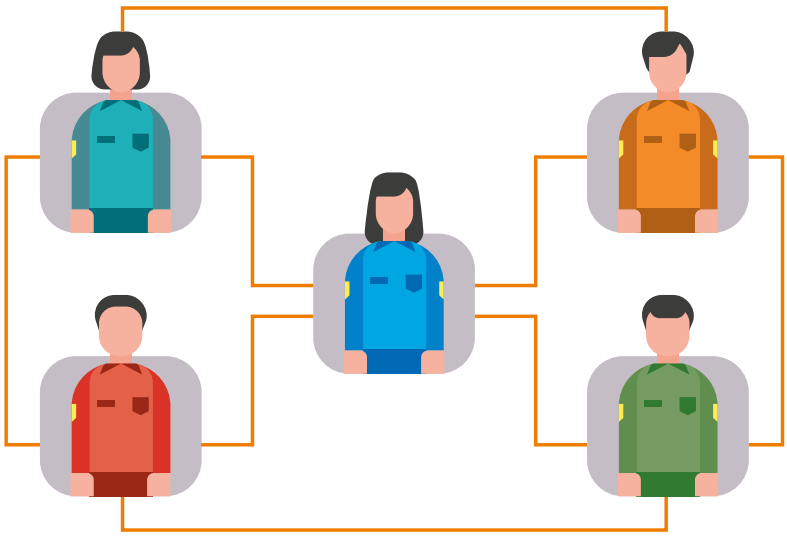

3.3 Pemetaan Pemangku Kepentingan

Keberadaan pemangku kepentingan adalah unsur penting dalam proses ini. Salah satu tahapan dalam pembangunan sinergi perencanaan di delapan kabupaten ini adalah memetakan para pemangku kepentingan dari setiap kabupaten untuk mendukung jalannya sinergi perencanaan antara unit layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan kampung. Peta pemangku kepentingan ini menyajikan informasi tentang aktor-aktor kunci yang akan terlibat dan bagaimana keterlibatan mereka dapat memengaruhi jalannya program.

Pemangku kepentingan Program KOMPAK-LANDASAN adalah aparat sipil negara dari lembaga pemerintahan pada tingkat provinsi, kabupaten maupun distrik yang dapat memengaruhi jalannya program melalui berbagai proses pengambilan keputusan. Pengaruh para pemangku kepentingan ini menjadi faktor yang menyukseskan pelaksanaan program maupun sebaliknya. Setiap pemangku kepentingan memiliki pengaruh dan kekuasaan sesuai tupoksinya. Semakin besar pengaruh yang dimiliki, maka semakin penting untuk keterlibatan mereka dalam program.

Hasil dari pemetaan pemangku kepentingan ini menggambarkan siapa saja yang memiliki kepentingan atau peran secara langsung dan tidak langsung terhadap program. Posisi yang berperan di setiap daerah dapat berbeda-beda. Misalnya di beberapa kabupaten, dukungan besar datang langsung dari bupati dan wakil bupatinya.

Pengaruh para pemangku kepentingan ini, menjadi faktor yang menyukseskan pelaksanaan program maupun sebaliknya. Setiap pemangku kepentingan memiliki pengaruh dan kekuasaan sesuai tupoksinya.

3.4 Revitalisasi Tim Teknis Kabupaten dalam Pelaksanaan Model Sinergi Perencanaan

Sejak periode 2017-2018, tim teknis kabupaten telah dibentuk dan mengawal jalannya Program KOMPAK-LANDASAN di tingkat kabupaten sesuai dengan tupoksi masing-masing. Pengembangan program yang memperkenalkan pendekatan sinergi perencanaan pada periode 2019-2021 menjadikan tim teknis yang telah dibentuk pada periode sebelumnya perlu mengalami revitalisasi. Hal ini agar fungsi tim teknis dapat dioptimalkan sesuai dengan pelaksanaan model sinergi perencanaan dan *output* yang diharapkan.

Melalui koordinator kabupaten dan koordinator distrik, proses penentuan dan pengesahan tim teknis kabupaten dijalankan. Akhirnya, terbentuklah tim teknis di delapan kabupaten wilayah program yang kelak mengawal jalannya program dan dukungannya menjadi faktor keberlanjutan program ini.

4 Mempersiapkan *Trainer*/Fasilitator Kabupaten

4.1 Menentukan Fasilitator Provinsi

Pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten terlibat langsung dalam proses pelaksanaan dan pengawalan model sinergi perencanaan yang diperkenalkan oleh Program KOMPAK-LANDASAN. Untuk itu, terlebih dahulu menyiapkan fasilitator di tingkat provinsi yang akan menjadi *trainer* dalam *Training of Trainer* (ToT) untuk fasilitator kabupaten. Fasilitator kabupaten yang telah mengikuti ToT akan mengawal proses sinergi perencanaan di tingkat kabupaten.

Fasilitator provinsi adalah mereka yang akan memperkenalkan model sinergi perencanaan pada para peserta yang berasal dari delapan kabupaten dampingan program KOMPAK-LANDASAN. Mereka akan memfasilitasi dan mengawal jalannya proses ToT sinergi perencanaan. Maka dari itu, dibutuhkan kapasitas dan kriteria yang sesuai untuk menentukan fasilitator provinsi khususnya kapasitas pengetahuan mereka mengenai perencanaan di tingkat kampung, Puskesmas dan sekolah. Tak kalah penting juga pengalaman mereka dalam memfasilitasi.

Setelah melalui proses diskusi yang panjang, maka terpilih sejumlah orang yang dianggap memiliki kapasitas untuk mengawal jalannya ToT sinergi perencanaan. Masing-masing sektor baik kesehatan, pendidikan maupun kampung akan difasilitasi oleh fasilitator provinsi. Mereka berasal dari lembaga pemerintah maupun nonpemerintah yang memang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam proses perencanaan di tingkat kampung, Puskesmas maupun sekolah.

4.2 Membangun Kesepahaman dengan Fasilitator Provinsi

Setelah menentukan fasilitator provinsi, langkah selanjutnya adalah membangun kesepahaman mengenai model sinergi perencanaan yang akan dijalankan. Mengingat bahwa fasilitator provinsi inilah yang nantinya akan memperkenalkan model sinergi perencanaan dan melatih para fasilitator kabupaten, beberapa rangkaian pertemuan untuk membangun kesepahaman ini dilakukan. Berbagai penyesuaian pun dihasilkan. Mulai dari menyepakati kriteria fasilitator kabupaten, alur pelaksanaan sinergi perencanaan dalam ToT, serta *output* dari setiap sesi yang akan dijalankan. Ini penting untuk mengukur keberhasilan proses.

Proses membangun kesepahaman ini pun bukan berarti tanpa kendala. Masing-masing sektor memiliki proses dan metode perencanaannya sendiri. Sehingga diperlukan diskusi mendalam untuk memastikan titik proses bersinergi ini sudah tepat dan akan berjalan sesuai harapan. Selain itu diskusi menentukan alat kaji yang akan digunakan masing-masing sektor untuk memperoleh kesamaan persepsi mengenai permasalahan yang dihadapi di satu kampung. Kesamaan data pun menjadi poin yang penting untuk dibahas. Tentu saja perlu penyesuaian data pada masing-masing sektor sebelum menentukan permasalahan dan upaya penyelesaiannya agar semua tepat sasaran.

Bersama dengan tim KOMPAK-LANDASAN, fasilitator provinsi menyiapkan *outline* dan materi yang akan disampaikan pada kegiatan ToT. Dengan tekad yang sama untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar berkualitas di Papua dan Papua Barat, tim fasilitator pun siap mengawal proses ToT sinergi perencanaan untuk mempersiapkan fasilitator kabupaten.

Kesamaan data menjadi poin yang penting untuk dibahas. Tentu saja perlu penyesuaian data pada masing-masing sektor sebelum menentukan permasalahan dan upaya penyelesaiannya agar semua tepat sasaran.

4.3 Menentukan *Trainer*/Fasilitator Kabupaten

Setelah selesai dengan fasilitator provinsi, selanjutnya giliran menentukan fasilitator kabupaten yang akan mengikuti proses ToT sinergi perencanaan. Sebagai peserta, fasilitator kabupaten akan memperoleh peningkatan kapasitas pengetahuan mengenai sinergi perencanaan sekaligus melakukan simulasi. Untuk selanjutnya, fasilitator kabupaten yang telah mengikuti ToT ini akan memfasilitasi proses pelaksanaan sinergi perencanaan di kabupaten mereka. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari delapan kabupaten yang menjadi wilayah sasaran program.

Berdasarkan hasil diskusi dengan fasilitator provinsi maka ditentukan bahwa kriteria utama bagi peserta ToT ini adalah mereka yang memahami alur perencanaan di tingkat kampung, Puskesmas maupun sekolah. Selain itu, kemampuan dan pengalaman memfasilitasi juga menjadi nilai tambah. Setiap fasilitator kabupaten mewakili bidang kesehatan, pendidikan dan kampung. Sebagai pemegang estafet sinergi perencanaan, para peserta adalah orang-orang potensial yang dipilih dan diharapkan dapat mengimplementasikan perencanaan bersinergi di level kampung, Puskesmas dan sekolah di daerah masing-masing.

Melalui koordinator kabupaten dan koordinator distrik di masing-masing kabupaten, pihak KOMPAK-LANDASAN terus melakukan koordinasi dan diskusi dengan tim teknis kabupaten. Hal ini untuk memutuskan siapa yang akan menjadi fasilitator kabupaten serta memastikan kemampuan dan kesiapannya mengawal proses sinergi perencanaan di tingkat kabupaten nantinya. Setelah melalui proses diskusi yang panjang akhirnya terpilih sejumlah fasilitator di tiap kabupaten yang masing-masing mewakili sektor kesehatan, pendidikan dan kampung untuk selanjutnya akan mengikuti proses ToT sinergi perencanaan di tingkat provinsi.

Sebagai pemegang estafet sinergi perencanaan, para peserta adalah orang-orang potensial yang dipilih dan diharapkan dapat mengimplementasikan perencanaan bersinergi di level kampung, Puskesmas dan sekolah di daerah masing-masing.

Tiga Prinsip dalam Sinergi Perencanaan

1. Membangun kesepahaman mengatasi permasalahan melalui perencanaan.

2. Memberi ruang kepada masyarakat dan pemerintah kampung menjadi subjek dari perencanaan unit layanan dan sebagai penerima manfaat dari rencana kegiatan unit layanan.

3. Membangun komitmen unit layanan dan pemerintah kampung untuk melakukan tindakan dalam rangka mencapai harapan dan kebutuhan masyarakat.

4.4 *Training of Trainer* Sinergi Perencanaan

Setelah fasilitator provinsi dan kabupaten siap, saatnya melaksanakan ToT sinergi perencanaan. Bertajuk "*Training of Trainer* Sinergi Perencanaan Kampung, Kesehatan dan Pendidikan untuk Peningkatan Layanan Dasar", ToT ini digelar di Papua dan Papua Barat pada bulan November 2019. Kegiatan ini difasilitasi oleh fasilitator provinsi yang telah ditentukan sebelumnya bersama dengan tim KOMPAK-LANDASAN.

ToT ini berlangsung dengan metode *learning by doing*. Model kelas pun sangat dinamis dan membuka ruang diskusi bagi peserta untuk menggali banyak informasi mengenai konsep-konsep perencanaan. Metode pengajaran yang diberikan antara lain berupa arahan, diskusi kelompok, dan praktik. Peserta juga diajak melakukan simulasi musyawarah kampung yang menggambarkan proses sinergi perencanaan berjalan. Setidaknya terdapat 49 orang peserta dari Papua dan Papua Barat yang siap memegang tongkat estafet sinergi perencanaan di delapan kabupaten yang menjadi wilayah kerja program.

Tidak sulit untuk para peserta memahami alur sinergi perencanaan ini. Mengingat mereka merupakan orang-orang yang telah paham, bahkan juga terlibat dalam proses perencanaan di wilayahnya masing-masing. Berlangsung selama lima hari, proses ini berjalan layaknya melakukan perencanaan di tingkat kampung, Puskesmas dan sekolah.

Hal yang membedakan adalah momen di mana ketiga sektor bertemu dalam musyawarah kampung untuk memaparkan permasalahan masing-masing. Selanjutnya berdasarkan pemaparan tersebut, ditentukan program kerja yang akan dijalankan oleh masing-masing sektor dengan bersinergi bersama sektor lainnya.

Berbagai dukungan pun datang dari pemerintah provinsi. Sebagaimana disampaikan Donatus Motte, Kepala DPMK Provinsi Papua dalam sambutannya pada pembukaan ToT di Provinsi Papua, “Kalau pembangunan kampung tidak melalui musyawarah bersama masyarakat, maka tidak terjadi pembangunan. Karena pembangunan yang sesungguhnya adalah melibatkan seluruh masyarakat di dalamnya.”

Setelah lima hari mengikuti ToT, sejumlah peserta menyatakan semakin siap memfasilitasi proses perencanaan di kabupaten. “Selama ini, teman-teman di kampung melakukan proses perencanaan sendiri-sendiri. Dari pelatihan ini, saya sekarang tahu di mana celahnya untuk mereka bisa bersinergi. Saya siap untuk memfasilitasi karena ini memang menjadi bagian dari tugas saya,” ungkap Martha C. Yufuai, Staf Bidang Perencanaan, Bappeda Kabupaten Jayapura.

Selain kesiapan menjadi fasilitator, para peserta juga mengakui tantangan-tantangan perencanaan yang selama ini mereka temui. Seperti yang disampaikan Ary Rumainum, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire yang mengakui banyak kelemahan dalam melakukan perencanaan Puskesmas, “Selama ini saya sendiri tidak menyadari bahwa sebenarnya Puskesmas bisa ikut serta dalam proses penyusunan RPJMK, ternyata kita juga bisa hadir untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan ikut mendorong pembangunan kampung dari sektor kesehatan. Saya kira ini akan sangat baik bagi penyelesaian permasalahan kesehatan di kampung,” Ungkapnya.

Sementara di sektor pendidikan, Herlina S. Silubun, Kepala Sekolah SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam Kabupaten Asmat menyadari bahwa membuat perencanaan sekolah, terutama menentukan program yang tepat itu memang bukanlah hal yang mudah, namun jika itu bisa dibahas bersama tentu akan lebih ringan. “Saya selama ini alami membuat perencanaan sekolah itu susah sekali, tapi kalau kita bisa bersinergi, kita bisa bahas dan cari solusinya bersama-sama.

Setelah lima hari mengikuti ToT, sejumlah peserta menyatakan semakin siap memfasilitasi proses perencanaan di kabupaten.

Kita juga jadi tahu masyarakat itu maunya bagaimana, dari kampung juga bisa bantu dengan dasar data pendidikan yang kita sampaikan," ungkap Herlina.

Di Papua Barat sendiri, apresiasi sinergi perencanaan disampaikan oleh para fasilitator provinsi. "ToT ini sangat luar biasa, karena kami di pendidikan saat mendampingi sekolah menyusun rencana kerja itu hanya sebatas berandai-andai, tidak melibatkan kampung dan Puskesmas. Jadi kami memberi gambaran saja, jika guru mengajarkan tentang organ tubuh mengalami kesulitan sebenarnya minta tolong ke Puskesmas saja menggunakan alat-alat mereka, tapi pertanyaannya ini bisa direalisasikan tidak. Nah melalui kegiatan ini kebetulan dari kampung ada, Puskesmas ada, trus masing-masing punya program ternyata tiga-tiganya bisa sinkron. Ini akan menjadi pembelajaran yang bagus seandainya bukan hanya sekolah sasaran saja, namun semua sekolah bisa memerankan ini dengan kampung, pasti luar biasa," papar Tuning Supriadi, Fasilitator Perencanaan Sekolah, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua Barat dalam kegiatan ToT Sinergi Perencanaan Kampung, Kesehatan, dan Pendidikan untuk meningkatan layanan dasar di Papua Barat.

Tak mau kalah, para fasilitator kabupaten di Papua Barat pun menyatakan kesiapan mengawal sinergi perencanaan di wilayah masing-masing. Seperti yang diungkapkan oleh Jantje Tupalessy peserta dari DPMK Kabupaten Fakfak bahwa saat kembali nanti, dirinya siap menjadi fasilitator. "Saya pikir sudah siap dan saya cukup percaya diri karena ini memang tugas sehari-hari," ungkapnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Triyanti Ina Sunarjo, peserta dari bidang kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan. "Kemungkinan siap dan kita akan usahakan karena tugas ini berkaitan dengan tugas sehari-hari saya di Puskesmas," ujar Triyanti.

Blasius Kilmas, peserta bidang pendidikan Kabupaten Kaimana pun mengaku siap menjadi fasilitator. Posisinya sebagai pengawas sekolah dasar dirasa cukup strategis untuk menularkan sinergi perencanaan ke sekolah-sekolah. Dari Kabupaten Sorong, Yanerius Bukifan, peserta bidang pemberdayaan kampung, juga mengatakan bahwa meski tugas tersebut tidak berkaitan dengan tupoksi saat ini, pihaknya mengaku siap karena ini telah ia kuasai dan memang tugasnya sebelum ditempatkan di posisi baru.

Demikianlah berbagai tanggapan dari peserta ToT sinergi perencanaan di Papua dan Papua Barat. Selesainya proses ToT untuk menyiapkan fasilitator kabupaten ini menandakan proses uji coba model sinergi perencanaan di tingkat kampung, Puskesmas dan sekolah pun siap dilaksanakan.

5 Mempraktikkan Konsep Sinergi Perencanaan

5.1 Menyiapkan Kampung, Puskesmas dan Sekolah

Bersinergi adalah bekerja bersama-sama untuk satu tujuan. Seperti itulah kampung, Puskesmas dan sekolah diharapkan berkolaborasi untuk kemajuan bersama. Jika selama ini masing-masing unit layanan membuat perencanaan dan bekerja sendiri, model perencanaan yang tersinergi menawarkan kolaborasi dalam menyusun dan menyelesaikan permasalahan. Hal ini mengingat bahwa masing-masing sektor memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan. Tanpa bersinergi, akan sulit menghasilkan layanan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebelum mulai mempraktikan sinergi perencanaan, beberapa hal perlu diketahui dan disiapkan oleh masing-masing sektor. Mengingat program ini akan dilakukan dengan mempraktikkan langsung pada pelaksanaan perencanaan kampung, Puskesmas dan sekolah yang akan dilakukan, maka idealnya kampung ini memang tengah dalam proses penyusunan program kerja, begitu pula Puskesmas dan sekolah.

Melalui perencanaan yang bersinergi ini akan lahir usulan RPJMK dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK); Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas; Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) sekolah. Semua dokumen perencanaan ini akan menjadi dasar dalam melakukan kegiatan pembangunan di wilayah kampung masing-masing, termasuk Juga kegiatan pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat oleh Puskemas dan sekolah. Untuk tujuan ini, maka tim penyusun RPJMK dan RKPK pun perlu disiapkan untuk menyusun

Selain waktu dan tempat, beberapa kondisi yang perlu dipersiapkan diantaranya dukungan pemerintah kampung, Puskesmas dan sekolah terhadap program, sarana dan prasarana pendukung untuk proses perencanaan dan musyawarah kampung.

perencanaan kampung. Begitu pula tim penyusun perencanaan Puskesmas dan sekolah akan bergabung dalam musyawarah kampung memaparkan permasalahan yang dihadapi sektor masing-masing.

Dalam mempersiapkan pelaksanaan workshop sinergi perencanaan ini, pihak KOMPAK-LANDASAN melalui koordinator kabupaten dan koordinator distrik pun terus berkordinasi dengan fasilitator kabupaten, termasuk menentukan waktu dan kampung yang akan dipilih untuk melaksanakan uji coba model sinergi perencanaan ini. Tidak semua kampung akan menjadi sasaran uji coba model ini. Harapannya, kampung yang dipilih akan menjadi contoh bagi wilayah lain di sekitarnya untuk mereplikasi model sinergi perencanaan ini.

Selain waktu dan tempat, beberapa kondisi yang perlu dipersiapkan diantaranya dukungan pemerintah kampung, Puskesmas dan sekolah terhadap program, sarana dan prasarana pendukung untuk proses perencanaan dan musyawarah kampung.

Tentunya dengan terlebih dahulu melakukan diskusi dengan pihak tim perencanaan baik di kampung, Puskesmas dan sekolah mengenai model sinergi perencanaan yang akan dijalankan. Akhirnya terpilihlah masing-masing satu kampung di Kabupaten Manokwari Selatan, Kaimana, Sorong, Fakfak, Nabire, Asmat dan Boven Digoel. Sedangkan di Kabupaten Jayapura sendiri dilaksanakan di lima kampung di dalam wilayah Distrik Demta yaitu Yakore, Yaugapsa, Demta, Kamdera dan Ambora.

5.2 Pelaksanaan Workshop Sinergi Perencanaan Kampung dengan Unit Layanan Dasar

"Anak-anak di kampung ini jarang masuk sekolah. Kalau kami ketemu mereka di luar, mereka bilang malas pergi sekolah. Saat kami tanya mama sama bapak bilang apa, mereka jawab kalau dorang bilang kasi tinggal saja sudah! Di sini kami sedih. Kami menganggap kalau kesadaran orang tua memang juga kurang. Padahal pendidikan itu penting untuk anak-anak kita," ungkap Herlina S. Silubun, Kepala Sekolah SD YPPK St. Martinus de Pores Ayam. *"Anak-anak itu wajib sekolah. Kami minta Bapa Kepala Kampung buatkan peraturan soal ini, bisakah tidak?"* tanya Bu Herlina. *"Kampung siap demi meningkatkan sumber daya manusia di kampung,"* jawab Yunus Askoman, Kepala Kampung Wawcesau.

Demikianlah sekilas diskusi dalam forum musyawarah kampung di Kampung Wawcesau, Distrik Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Proses musyawarah kampung untuk penyusunan RPJMK ini dilakukan bersinergi dengan sekolah dan Puskesmas. Asmat sendiri adalah satu dari delapan lokasi pelaksanaan uji coba sinergi perencanaan.

Kegiatan pendampingan sinergitas perencanaan ini melibatkan orang-orang yang memang berperan dalam penyusunan perencanaan kampung, Puskesmas dan sekolah sebagai subjek utama. Dalam proses perencanaan tersebut, mereka didampingi oleh fasilitator kabupaten yang telah mengikuti kegiatan ToT Sinergitas Perencanaan Kampung, Puskesmas dan Sekolah untuk Peningkatan Layanan Dasar yang juga dilaksanakan oleh program KOMPAK-KOMPAK-LANDASAN di Provinsi Papua dan Papua Barat.

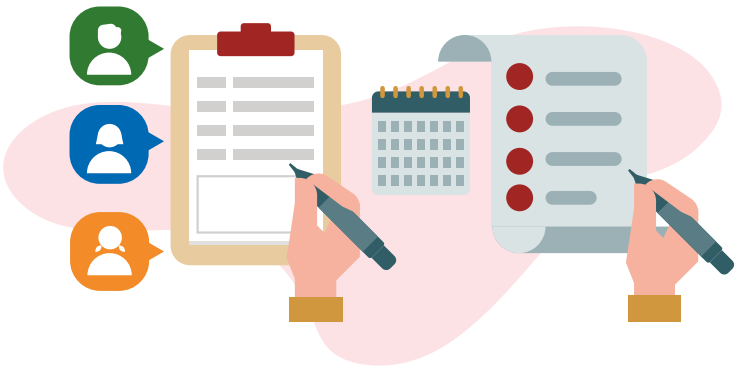

Memulai proses perencanaan, pengkajian keadaan kampung dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi kampung. Proses ini penting sebelum mengidentifikasi permasalahan. Hal ini agar masalah yang diidentifikasi bisa sesuai dengan data dan kondisi yang benar-benar terjadi di kampung. Dasar informasi yang sama dalam melihat permasalahan akan menghasilkan analisis masalah yang lebih akurat.

Dasar informasi yang sama dalam melihat permasalahan akan menghasilkan analisis masalah yang lebih akurat. Dalam proses ini, data Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) juga sangat membantu dalam melakukan identifikasi.

Dalam proses ini, data Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) juga sangat membantu dalam melakukan identifikasi.

Pengkajian keadaan kampung ini dikerjakan sendiri oleh masyarakat. Tahap ini dilakukan dengan menggunakan beberapa alat kaji di antaranya:

- Sketsa kampung yang berfungsi untuk melihat kondisi kampung secara fisik;
- Kalender musim untuk melihat kondisi kampung dalam setiap musim yang ada;
- Diagram kelembagaan untuk memetakan lembaga-lembaga formal maupun non formal yang ada di kampung beserta perannya masing-masing; dan
- Sejarah kampung yang bertujuan untuk melihat perkembangan kampung dari waktu ke waktu.

Hasil identifikasi dari semua alat kaji ini kemudian memunculkan daftar masalah dan potensi yang ada di kampung.

Tahap selanjutnya adalah memikirkan bersama beberapa pilihan solusi atas masalah yang telah teridentifikasi. Proses ini dilakukan secara partisipatif sehingga benar-benar berasal dari masyarakat.

Selanjutnya adalah membuat prioritas dari solusi-solusi yang telah dirembukkan. Proses ini juga nantinya akan membantu untuk menentukan usulan kegiatan yang menjadi prioritas selanjutnya sebagai program alternatif di tahun pertama yang diusulkan dalam RKPK.

Proses pengkajian keadaan kampung ini juga berlangsung di Puskesmas dan sekolah. Menggunakan data kesehatan dan pendidikan, Puskesmas dan sekolah mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang mereka miliki. Musyawarah kampung merupakan momen penting dalam proses perencanaan. Pada tahap inilah sinergi antara kampung dan unit layanan dasar dalam melakukan perencanaan terjadi.

Dalam musyawarah kampung, tim perencanaan dari Puskesmas dan sekolah hadir untuk memaparkan permasalahan yang mereka hadapi. Begitu pula kampung memaparkan permasalahan yang telah mereka identifikasi. Tahap ini sekaligus mengklarifikasi masalah dan menyepakati solusi secara bersama-sama.

Permasalahan-permasalahan yang dipaparkan Puskesmas dan sekolah pun ditanggapi oleh kampung, begitu pula sebaliknya. Hadirnya unit layanan dalam musyawarah kampung memberikan harapan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah mereka. Begitu pula harapan dan kebutuhan dari unit layanan yang diharapkan oleh pemerintah kampung. Diskusi antara pihak kampung, Puskesmas dan sekolah mengenai program apa yang dapat dilakukan secara bersinergi ke depannya pun terjadi.

Di Kampung Tanama Kabupaten Fakfak misalnya, orang tua siswa mengeluhkan anak-anak mereka yang masih sulit membaca. Guru-guru sekolah dalam pemaparan masalahnya pun menyampaikan bahwa anak-anak sulit berkonsentrasi belajar karena suara musik yang terlalu keras oleh sejumlah warga di sekitar sekolah. “Butuh kesadaran dari kita semua soal musik ini. Itu sangat mengganggu. Kami mohon kerja sama dari masyarakat sekalian,” ungkap Natalia Laba, Guru SD INP Tanama. Atas kondisi ini, pemerintah kampung pun berinisiatif untuk melakukan sosialisasi dan membuat peraturan untuk tidak membunyikan musik saat jam pelajaran.

Tidak kalah penting juga permasalahan pendidikan yang terjadi di Kampung Waroser, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan. Pihak sekolah mengeluhkan siswa yang sering bolos dan kurangnya perhatian dari orang tua siswa untuk menyelesaikan masalah ini. Sejumlah orang tua siswa yang hadir pun mengakui bahwa mereka seringkali membawa serta anak mereka ke kebun sehingga tidak ke sekolah. Dalam musyawarah kampung ini akhirnya orang tua bertemu dengan pihak sekolah dan memperoleh informasi mengenai pentingnya pendidikan bagi anak. Mereka pun berjanji untuk lebih memperhatikan pendidikan anak-anak mereka. Ketersediaan buku pelajaran juga menjadi permasalahan yang menghambat proses belajar mengajar.

Kepala Kampung, Samuel Waromi mengungkapkan bahwa ia baru mengetahui permasalahan yang dihadapi sekolah di kampungnya. Pihaknya berjanji untuk menyediakan dana pembelian buku bagi sekolah dan akan terus menghimbau masyarakatnya agar memperhatikan pendidikan anak-anak mereka.

Sementara di Kabupaten Kaimana, berdasarkan data Pustu Kampung Marsi, sebanyak 80 persen ibu hamil tidak memeriksakan kesehatannya secara rutin dan tidak melahirkan di fasilitas kesehatan. Pihak Puskesmas berulang kali memberikan sosialisasi mengenai hal tersebut namun tidak membuahkan hasil. Musyawarah kampung akhirnya menjadi wadah bagi Puskesmas mengemukakan hal tersebut. Mereka juga menyampaikan risiko yang akan timbul jika hal ini terus berlanjut. “Ibu-ibu mungkin merasa lebih nyaman di rumah saja. Dipikirnya kami juga bisa datang membantu proses persalinan. Tapi tidak bisa kami bawa semua alat-alat kesehatan yang dibutuhkan kalau darurat. Belum lagi kondisi tempatnya tidak steril,” ungkap Hasrawati, Bidan Pustu Kampung Marsi. Untuk itu, pihak kampung berjanji akan membuat peraturan kampung yang mewajibkan ibu hamil memeriksakan kandungan secara rutin dan melahirkan di fasilitas kesehatan yang tersedia.

Melalui musyawarah kampung, banyak pihak yang mulai terbuka untuk mengungkapkan permasalahan dan harapan mereka. Memang banyak masalah penting yang memerlukan peran berbagai pihak untuk menyelesaikannya. Seusai pemaparan masalah dan identifikasi solusi, para peserta kembali berembuk dalam kelompok sektor. Mereka mengulas kembali potensi solusi menyelesaikan masalah berdasarkan masukan-masukan yang disampaikan dalam musyawarah kampung. Selanjutnya akan dihasilkan usulan program yang kembali akan dipaparkan untuk mendapatkan masukan dari forum.

Di Kampung Waharia, Kabupaten Nabire, diketahui bahwa sering kali kader Posyandu balita dan lansia kurang aktif menjalankan tugas karena menerima insentif yang sangat minim. Di sisi lain, mereka juga perlu terus dipantau kesehatan dan kesejahteraannya. Atas permasalahan ini, pemerintah kampung bersedia menaikkan dana insentif bagi kader. Sementara Puskesmas akan memantau keaktifan kader dan memberikan beragam pelatihan yang dibutuhkan.

Di Kampung Sokanggo, Kabupaten Boven Digoel, sekolah mengalami kekurangan tenaga pengajar sehingga proses belajar tidak dapat berjalan efektif. Pengadaan guru honorer terkendala biaya insentif. Akhirnya kampung dan sekolah sepakat untuk bekerja sama. Sekolah akan menyeleksi dan memastikan tersedianya tenaga honorer yang akan mengajar, sementara kampung akan menanggung biaya insentif tenaga honorer tersebut.

Lain lagi permasalahan yang dihadapi Kampung Malaumkarta, Kabupaten Sorong. Tidak adanya Unit Kesehatan Sekolah (UKS) menjadi masalah ketika

ada siswa yang sakit pada jam belajar. Kampung kemudian menyepakati akan menyediakan bantuan sarana dan prasarana kesehatan bagi sekolah. Sedangkan Puskesmas bersedia melatih pengelolaan dan pelaksanaan UKS bagi sekolah. Demikianlah proses perencanaan yang bersinergi di antara unit layanan. Ada pembagian peran dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama.

Menyusun RPJMK bersama Puskesmas dan sekolah adalah hal yang benar-benar baru bagi para peserta. Hal yang sama juga dialami oleh tim perencanaan Puskesmas dan sekolah. Ini adalah pengalaman pertama bagi mereka berpartisipasi dalam musyawarah kampung. Saul Kosai, Kepala Kampung Yaugapsa, Kabupaten Jayapura mengungkapkan "Diskusi dalam Musrenbang kampung memang pernah dilakukan. Namun tidak seperti yang saat ini didorong oleh pihak KOMPAK-LANDASAN di mana sekolah dan Puskesmas dipertemukan dengan kampung untuk mengkaji masalah dan merumuskan pemecahannya bersama-sama.Proses seperti ini, akan kami budayakan dan jadikan mekanisme kerja sama dalam Kampung Yaugapsa," Ungkapnya.

Begitulah cerita tentang proses uji coba model sinergi perencanaan kampung dan unit layanan dasar di delapan kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat. Setelah menghasilkan usulan kegiatan di masing-masing sektor, proses ini belumlah selesai. Berikutnya akan ada proses pendampingan hingga dokumen perencanaan selesai dan memastikan bahwa program yang bersinergi antara kampung, Puskesmas dan sekolah benar-benar tertuang di dalamnya.

5.3 Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung, Puskesmas dan Sekolah

Kegiatan pendampingan sinergi perencanaan antara kampung dan unit layanan dasar yaitu Puskesmas dan sekolah menghasilkan rancangan program masing-masing sektor. Namun proses ini belum berakhir, masih ada proses panjang yang akan dilalui oleh kampung untuk menghasilkan dokumen RPJMK. Begitu pula Puskesmas dan sekolah yang juga akan menyempurnakan dokumen perencanaan mereka.

Proses penyelesaian dokumen akan terus berjalan dengan didampingi oleh fasilitator lapangan dan tim KOMPAK-LANDASAN melalu koordinator kabupaten dan koordinator distrik. Mengingat bahwa bagi sejumlah kampung, membuat dokumen perencanaan sendiri merupakan hal yang baru.

Dengan komitmen dari kampung, Puskesmas dan sekolah, sinergi perencanaan kampung dan unit layanan yang telah dibangun diharapkan dapat berjalan baik di setiap kabupaten hingga tertuang dalam dokumen perencanaan mereka. Dengan demikian, delapan kabupaten yang menjadi wilayah kerja program ini masing-masing akan memiliki kampung pertama yang membuat dokumen perencanaan yang bersinergi dengan Puskesmas dan sekolah. Tim KOMPAK-LANDASAN akan terus mendampingi dan mengawal proses perencanaan yang bersinergi ini untuk tujuan besar meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang berkualitas.

Berjalannya perencanaan yang bersinergi antara pemerintah kampung dan unit penyedia layanan kesehatan dan pendidikan adalah pertama kalinya di Papua dan Papua Barat yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.

Tim KOMPAK-LANDASAN akan terus mendampingi dan mengawal proses perencanaan yang bersinergi ini untuk tujuan besar meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang berkualitas.

●●●

Berjalannya perencanaan yang bersinergi antara pemerintah kampung dan unit penyedia layanan kesehatan dan pendidikan adalah pertama kalinya di Papua dan Papua Barat yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.

Penutup

Proses yang telah dijalankan oleh Program KOMPAK-LANDASAN Fase II melalui model sinergi perencanaan ini adalah perjalanan panjang yang tidak mudah. Mulai dari penyusunan konsep hingga dapat diimplementasikan di tingkat kampung, Puskesmas dan sekolah. Proses ini sendiri pun masih terus berjalan hingga dihasilkan mekanisme yang terintegrasi dan terinstitusionalisasi dalam sebuah sistem perencanaan.

Program sinergi perencanaan ini melibatkan banyak pihak mulai dari tim internal KOMPAK-LANDASAN, pemerintah provinsi maupun kabupaten, hingga masyarakat kampung. Lewat buku ini kami ingin berterima kasih pada mereka semua yang terlibat dalam proses ini. Buku ini hadir untuk mengabadikan perjuangan bersama dalam membangun perencanaan yang bersinergi untuk sebuah tujuan besar yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang berkualitas.

Cerita-cerita yang disajikan dalam buku ini semoga dapat menjadi inspirasi bagi mereka yang hendak membangun model sinergi perencanaan di tingkat kampung, Puskesmas dan sekolah. Juga menjadi sumber informasi bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang proses membangun perencanaan yang bersinergi antara kampung dengan layanan dasar kesehatan dan pendidikan (Puskesmas dan sekolah dasar) oleh tim KOMPAK-LANDASAN.

Sekian dan Terima kasih

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

Jl. Diponegoro No. 72, Jakarta 10320 Indonesia
T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090
E: info@kompak.or.id
www.kompak.or.id

ISBN 978-623-95507-0-7 (PDF)